

**DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PEMBERI DAN PENERIMA SUAP
SERTA AKIBAT HUKUM DALAM PILKADA DAN PEMILU**

INTISARI

**Skripsi Ini Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



OLEH:

GEORGE FANDI MOLDENA

18310297

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA**

KUPANG

2024

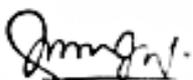
LEMBARAN PENGESAHAN

INTISARI

22 Januari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum

NIDN : 0822106401



Otlief J.R. Wewo SH., M.Hum

NIDN : 0805106501

Mengesahkan

Rektor

Dekan

Universitas Kristen Artha

Fakultas Hukum

Wacana Kupang



Prof. Dr. Ir Godliet Frederik Neonufa, MT
NIDN : 0821046601



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum
NIDN : 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

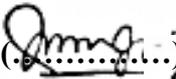
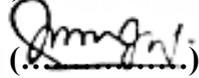
Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
Fax: +62 380 881677 Email: Admind@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo0.co.id

BERITA ACARA

Pada hari **SENIN** tanggal 22 (**DUA PULUH DUA**) bulan **JANUARI** tahun 2024 (**DUA RIBUH DUA PULUH EMPAT**) telah dielesaikan ujian Skripsi/Koperhensif, Di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

Nama : George Fandi Moldena
Nim : 18310297
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Tindak Pidana Pemberi Dan Penerima Suap Serta Akibat Hukum Dalam Pilkada Dan Pemilu

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum 
Sekretaris : Otlief J.R.Wewo., SH.,M.Hum 
Anggota : 1. Dr Filmon M. Polin, Amd.SH.,MH 
2. Tontji Ch. Rafael, SH.,MH 
3. Ellon Belwan C. Mau, SH.,M.Hum 

22 Januari 2024

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum
NIDN : 0822106401

INTISARI

Judul skripsi ini: dan rumusan masalah adalah Deskripsi Tentang Tindak Pidana Pemberi Dan Penerima Suap Serta Akibat Hukum Dalam Pemilu Dan Pilkada; Rumusan masalah 1).Faktor apakah yang menyebabkan pemilih menerima suap dalam pemilu dan pilkada,? 2).Faktor apakah yang menyebabkan pemberian suap dalam pemilu dan pilkada ? 3).Apa akibat hukum bagi penerima dan pemberi suap dalam pemilu dan pilkada?. Tujuan penelitian adalah 1).untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pemilihan menerima suap dalam pilkada dan pemilu 2). untuk mengetahui Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan/peristiwa yang se jelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini sifat dan deskriptif atas penjelasan tentang, “faktor penyebab serta akibat hukum dari tindak pidana suap dalam pilkada dan pemilu”.jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat dalam (dependet). adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah tindak pidana dalam pilkada dan pemilu. variabel terikat adalah ubahan terikat yang di pengaruhi atau menjadi akibat dari adanya perubahan variabel l bebas. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah: Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam pilkada dan pemilu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, data sekunder terdiri dari: Dokumen Resmi, Buku-Buku, Peraturan Perundang-Undangan dan Hasil Penelitian yang sudah ada. Didalam penelitian hukum jenis data sekunder mencakup: bahan hokum primer, bahan hokum sekunder, bahan hokum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi pustaka. Studi pustaka atau studi dokumen adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian informasi tersebut diperoleh buku-buku, maupun elektronik. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif kualitatif” analisis penelitian Faktor yang menyebabkan pemilih menerima suap dalam pilkada dan Pemilu, Faktor yang menyebabkan pemberian suap dalam pilkada dan pemilu dan Akibat hukum dari tindak pidana suap dalam plkada dan pemilu. Kesimpulan Faktor yang menyebabkan pemberian suap dalam pilkada dan pemilu agar memenangkan calon tertentu. Faktor penerima suap dalam pilkada dan pemilu karena kebutuhan ekonomi. Saran jangan menerima suap dalam bentuk apapun, boleh mempengaruhi orang dengan memakai cara lain yang tidak berkenan dengan hukum

Kata kunci :Tindak Pidana Suap

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Antonius P.S Wibowo S.H.MH” *Busines should work against all forms of corruption* ”, *dalam Bidang Pidana Suap*,(Jakarta,2006), hal. 35.
- Hisar Sitohang Martono Anggusti” *Analisi Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Denngsn Penyalagunaan Jabatan Dalam Betuk Penyuapan Aktif*” (Surabaya,agustus 2018),hal. 79-80.
- Antonius P.S Wibowo S.H.MH “ *Bidang Pidana Suap*”(Jakarta, desember 2006), hal. 4-5.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 79.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010, hlm. 193.
- Yulies Tiena Masriani,*Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika*, Jakarta, 2010, hlm. 60.
- Handitya, B. (2018). *Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu. In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (Vol. 4, No. 02, pp. 348-365)*
- Ersan, P., & Erliyana, A. (2018). *Kualifikasi Hukum Pidana Khusus Terhadap Tindak Pidana Pemilu/Pilkada (Tinjauan Hukum Administrasi Negara). Jurnal Pakuan Law Review, 4(1).*

Undang-undang No. 2 tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Maruar Sihaan, 2006, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,.hlm 235. 49

Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Rajawaliipers. hlm.13

Undang-undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

Jurnal :

Hisar Sitohang, Martono Anggusti, Uton Utomo. *Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen. Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalagunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuapan Aktif*. Volume 07 Nomor 02, Agustus 2018 Page : 75 – 88

Hidayat. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal EduTech Vol. 3 No.2 September 2017* 50

Hening Satitis. *Kasus Suap Uang Jelang Pemilu dalam Politik dilihat dari Etika menurut Machiaveli Muhamad Mustofa*. Fakultas Ilmu Sosial dan Polotik Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424. *Suap Menyupap dan Mafia Peradilan di Indonesia : Telah Kriminilogis Ronald Reyhan, Vanessa Octavia, Velencia Winata*. Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jalan

Letjen S.Parman, Jakarta 11440. *Analisis Terhadap Penegakan Hukum Pemilu Dalam Perspektif Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Di Indonesia*

Putusan Hakim :

Putusan Nomor.83/Pid.B/2016/PN.Cjr

Putusan Nomor.16/Pid.Sus/2021/PN.Jap

Putusan Nomor.45/Pid.B/2014/PN.Ekg

Putusan Nomor.46/Pid.B/2014/PN/Ekg

Putusan Nomor.17/Pid.Sus/2021/PN.Jap